



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR : W.12-36 .HH.01.05 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIMUKTAHIRKAN BERKALA, SETIAP SAAT, DAN
DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan;
 - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tentang Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIMUKTAHIRKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TAHUN 2022

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dimuktahirkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dimuktahirkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Maret 2022
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12-36.HH.01.05 Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2022**

No	Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan
1	OBH Terverifikasi dan Terakreditasi Tahun 2022-224
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
3	Laporan Pengendalian Resiko Semester I Tahun 2022
4	Laporan Rencana Aksi Penanganan Resiko Tahun 2022
5	Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten 2020-2024
6	Rencana Strategis Tahun 2020-2024
7	SK Rencana Kerja Tahun 2022
8	Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Eselon I
9	Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Pejabat Struktural Tahun 2022
10	Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022
11	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
12	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
13	Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2022
14	Agenda Kantor Wilayah Bulan Januari Tahun 2022
15	Agenda Kantor Wilayah Bulan Februari Tahun 2022
16	Agenda Kantor Wilayah Bulan Maret Tahun 2022
17	Agenda Kantor Wilayah Bulan April Tahun 2022
18	Agenda Kantor Wilayah Bulan Mei Tahun 2022
19	Agenda Kantor Wilayah Bulan Juni Tahun 2022
20	Agenda Kantor Wilayah Bulan Juli Tahun 2022
21	Catatan Atas Laporan Keuangan Kanwil Banten DIPA Sekretariat Jenderal
22	Catatan Atas Laporan Keuangan Kanwil Banten DIPA Direktorat Jenderal Masyarakat
23	Catatan Atas Laporan Keuangan Kanwil Banten DIPA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
24	Catatan Atas Laporan Keuangan Kanwil Banten DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi
25	Statistik Kepegawaian
26	Daftar Nama OBH Provinsi Banten

27	Monitoring Divisi Administrasi B06
28	Monitoring Divisi Imigrasi B06
29	Monitoring Divisi Pelayanan Hukum dan HAM B06
30	Monitoring Divisi Pemasyarakatan B06
31	Daftar Notaris Kabupaten Pandeglang dan Lebak
32	Daftar Notaris Kabupaten Serang dan Kota Cilegon
33	Daftar Notaris Kabupaten Tangerang
34	Daftar Notaris Kota Serang
35	Daftar Notaris Kota Tangerang Selatan
36	Daftar Notaris Kota Tangerang
37	Laporan Analisa Kebijakan Triwulan I Tahun 2022
38	Laporan Analisa Kebijakan Triwulan II Tahun 2022
39	Data Jumlah Warga Binaan
40	Data Pelayanan Keimigrasian
41	Statistik Keuangan
42	SK DIP yang Dimutakhirkan, Berkala, Setiap Saat dan Dikecualikan Kanwil Tahun 2022
43	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi

Lampiran II
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12-36.HH.01.05 Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2022**

No	Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan
1	Capaian Target Kinerja Tahun 2022
2	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) 2022
3	SOP Aplikasi Jawara
4	SOP Laporan Bulanan Notaris
5	SOP Aplikasi SIKAMPAS
6	SOP Permohonan Pewarganegaraan
7	SOP Permohonan Sumpah dan Pelantikan PPNS
8	SOP Permohonan Sumpah dan Pelantikan Notaris
9	SOP Permohonan Pendaftaran Desain Industri melalui <i>e-Filing</i>
10	SOP Permohonan Pendaftaran Merk melalui <i>e-Filing</i>
11	SOP Permohonan Pendaftaran Paten melalui <i>e-Filing</i>
12	SOP Ceramah Penyuluh Hukum
13	SOP Konsultasi Hukum
14	SOP Pinjam Buku
15	SOP Naskah Akademik
16	SOP Fasilitasi dan Konsultasi Mediasi
17	SOP Pengharmonisasian Raperda
18	SOP Penilaian Kab/Kota Peduli HAM
19	SOP Ranham
20	SOP YANKOMAS
21	SOP Tusi Humas
22	SOP Tusi Kepegawaian
23	SOP Tusi Keuangan
24	SOP Tusi PPL
25	SOP Ijin Kunjungan UPT Pemasarakatan
26	SOP Ijin Penelitian UPT Pemasarakatan

27	SOP Layanan Informasi Integrasi
28	SOP Layanan Informasi Remisi
29	SOP Alih Penjamin
30	SOP Alih Rangkap Jabatan
31	SOP Alih Status ITAS ke ITAP
32	SOP Alih Status ITK ke ITAS
33	SOP Duplikat KITAP
34	SOP Perpanjangan ITAP
35	SOP Perpanjangan ITAS V
36	SOP Perpanjangan ITAS VI
37	SOP SKIM
38	SOP Pengelolaan dan Organisasi
39	SOP Layanan Informasi dan Pengaduan
40	SOP Layanan Customer Service
41	SOP Layanan Terpadu
42	SOP Layanan Pengaduan
43	SOP Pengaduan WBS
44	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
45	SOP Penghapusan BMN
46	SOP RKBMN dengan SIMAN
47	SK DIP yang Dimutakhirkan Berkala, Setiap Saat, dan Dikecualikan Kanwil Tahun 2022
48	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
49	Rincian Kertas Kerja Satker
50	Informasi Pelanggaran yang Ditemukan oleh Pengawas Internal dan Penindakannya

Lampiran III
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12-36.HH.01.05 Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2022**

No	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
1	Identitas Pelapor
2	Laporan Pengaduan dari Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
3	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin
4	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
5	Identitas Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
6	Identitas Pegawai yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan
7	Biodata Elektronik Pegawai (Database)
8	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural
9	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Belum Diaudit BPK



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Maret 2022
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.